

---

## Transparansi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda

---

**Alfinsi Brenda Rohali<sup>1</sup>, Abdul Rofik<sup>2</sup>, Ahmad Yani<sup>3</sup>, Trisna Waty Riza Eryani<sup>4</sup>**

Alfinsi Brenda Rohali, [alfinsirohali@gmail.com](mailto:alfinsirohali@gmail.com), Universitas Widya Gama Mahakam

Said Zulkifli, [saidzulkifli@uwgm.ac.id](mailto:saidzulkifli@uwgm.ac.id), Universitas Widya Gama Mahakam<sup>2</sup>

Deandlles Christover, [deandlles@uwgm.ac.id](mailto:deandlles@uwgm.ac.id), Universitas Widya Gama Mahakam<sup>3</sup>

Ahmad Yani, [ahmadyani@uwgm.ac.id](mailto:ahmadyani@uwgm.ac.id), Universitas Widya Gama Mahakam<sup>4</sup>

---

### Abstract

This research is motivated by the importance of transparency in the implementation of the Community Development and Empowerment Program (Probebaya) as one of the efforts to realize good governance at the village level. Transparency is needed so that the public can know the process of planning, implementation, and accountability of the program in an open and accountable manner. This study aims to determine the transparency of the implementation of Probebaya in Sungai Pinang Village, Samarinda City and identify supporting and inhibiting factors. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the village head, the village secretary, the head of the RT, the head of LPM, and the community. The research analysis is focused on the dimensions of transparency, namely informative, openness, and disclosure. The results of the study show that the implementation of Probebaya in Sungai Pinang Dalam Village has been quite transparent through the delivery of information to the community and community involvement in program activities. However, there are still obstacles in the form of a lack of public understanding of the program mechanism and limitations in the delivery of comprehensive information to all residents.

**Keywords:** Transparency; Probably; Good Governance; Community Empowerment;


---

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) sebagai salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat kelurahan. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program secara terbuka dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan, ketua RT, ketua LPM, dan masyarakat. Analisis penelitian difokuskan pada dimensi transparansi yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan (disclosure). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah berjalan cukup transparan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program serta keterbatasan penyampaian informasi secara menyeluruh kepada seluruh warga.

**Kata kunci:** Transparansi; Prokebaya; Good Governance; Pemberdayaan Masyarakat;

---

<b>Received</b>	:	05 Febuari 2026
<b>Accepted</b>	:	14 Maret 2026
<b>Published</b>	:	21 Mei 2026
<b>Copyright Notice</b>	:	<p><b>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication</b> with the work simultaneously licensed under a <b><u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u></b> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. LATAR BELAKANG

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Transparansi menjadi penting karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan anggaran publik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

Salah satu program pemerintah daerah yang menekankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kota Samarinda. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang memberikan dana pembangunan secara langsung kepada masyarakat melalui tingkat Rukun Tetangga (RT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kebutuhan warga. Dalam pelaksanaannya, Probebaya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat agar lebih aktif dalam proses pembangunan di lingkungan masing-masing. Namun, pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti kurang optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program, serta belum maksimalnya keterbukaan pemerintah kelurahan dalam memberikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Probebaya.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan Probebaya masih perlu ditingkatkan. Transparansi memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat karena masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program secara terbuka. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, Sedarmayanti (2012) menyatakan bahwa transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan *good governance* karena dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya

transparansi, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah.

Dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan transparansi sebagai bagian dari prinsip *good governance*. Penelitian difokuskan pada tiga dimensi transparansi, yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan (*disclosure*). Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah Kelurahan Sungai Pinang Dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Probebaya. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Sementara itu, Abdullah (2015) menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan hasil sintesis pemikiran deduktif dan induktif yang menghasilkan konsep penelitian secara sistematis. Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji transparansi pelaksanaan Probebaya melalui keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah memiliki pengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan. Transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat akuntabilitas publik. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan rendahnya partisipasi dalam pembangunan. Oleh sebab itu, penerapan transparansi dalam program Probebaya menjadi sangat penting agar tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat transparansi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan transparansi pemerintahan dan *good governance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Probebaya agar lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif**. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Sementara itu, Moleong (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan fokus pada transparansi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda. Fokus penelitian diarahkan pada aspek informatif, keterbukaan, dan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaksanaan program. Selain itu, penelitian juga mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat transparansi dalam implementasi Probebaya.

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling memahami permasalahan yang diteliti. Informan penelitian terdiri atas Lurah Sungai Pinang Dalam sebagai *key informant*, sekretaris kelurahan, ketua RT, ketua LPM, dan masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan pelaksanaan Probebaya di lokasi penelitian. Menurut Abdussamad (2021), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi terkait transparansi pelaksanaan program. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip, laporan, foto kegiatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Probebaya.

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan

dokumentasi. Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data yang relevan mengenai transparansi pelaksanaan Probebaya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan interpretasi data yang telah dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 3. HASIL

#### 3.1 Transparansi Pelaksanaan Program Probebaya

Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam menunjukkan adanya upaya pemerintah kelurahan dalam menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi program, pelibatan masyarakat dalam musyawarah, serta keterbukaan penggunaan anggaran kegiatan Probebaya.

Pemerintah kelurahan memberikan informasi terkait program melalui rapat RT, musyawarah kelurahan, papan informasi, dan komunikasi langsung kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan meliputi jenis kegiatan, tujuan program, jadwal pelaksanaan, serta penggunaan dana Probebaya.

##### 3.1.1 Aspek Informatif

Aspek informatif dalam pelaksanaan Probebaya terlihat dari penyampaian informasi oleh pihak kelurahan kepada masyarakat mengenai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Informasi diberikan sebelum kegiatan dimulai agar masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat program.

Masyarakat memperoleh informasi melalui ketua RT dan pertemuan warga. Selain itu, pemerintah kelurahan juga menyampaikan informasi terkait mekanisme pengusulan kegiatan dan pelaksanaan program Probebaya.

Tabel 1. Penyampaian Informasi Program Probebaya

No	Bentuk Informasi	Media Penyampaian
1	Sosialisasi program	Musyawarah RT
2	Informasi anggaran	Papan informasi
3	Pelaksanaan kegiatan	Pertemuan warga

### 3.1.2 Aspek Keterbukaan

Keterbukaan dalam pelaksanaan Probebaya ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan program sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing.

Pihak kelurahan juga membuka ruang diskusi kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Probebaya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan.

### 3.1.3 Aspek Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan informasi dilakukan melalui penyampaian laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan berupaya memberikan informasi yang jelas mengenai realisasi kegiatan Probebaya.

Namun demikian, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami secara rinci mengenai besaran anggaran dan mekanisme pengelolaan dana Probebaya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap informasi administrasi program.

## 3.2 Faktor Pendukung Transparansi Probebaya

Faktor pendukung transparansi dalam pelaksanaan Probebaya meliputi adanya dukungan pemerintah kelurahan, partisipasi masyarakat, dan komunikasi yang baik antara aparat kelurahan dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keterbukaan informasi. Selain itu, koordinasi antara RT, LPM, dan pihak kelurahan juga membantu kelancaran penyampaian informasi program.

Tabel 2. Faktor Pendukung Transparansi Probebaya

No	Faktor Pendukung	Keterangan
1	Dukungan pemerintah	Memfasilitasi kegiatan Probebaya
2	Partisipasi masyarakat	Mengikuti musyawarah dan kegiatan
3	Komunikasi yang baik	Mempermudah penyampaian informasi

### 3.2.1 Faktor Penghambat Transparansi Probebaya

Faktor penghambat transparansi dalam pelaksanaan Probebaya meliputi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program, keterbatasan penyampaian informasi, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan musyawarah.

Selain itu, masih terdapat masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan program sehingga informasi yang diberikan oleh pihak kelurahan tidak diterima secara menyeluruh.



Gambar 1 Wawancara dengan bapak Novi Kurnia, S. Sos. selaku Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda sebagai key Informant (4 Juli 2025)



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Sidete selaku Ketua RT 10 Sebagai Informant (4 Juli 2025)

Keterangan gambar:

1. Penyampaian informasi kepada masyarakat.
2. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah.
3. Pengungkapan penggunaan anggaran program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam telah dilaksanakan melalui aspek informatif, keterbukaan, dan pengungkapan informasi. Namun, pelaksanaan transparansi masih menghadapi beberapa hambatan, terutama pada pemahaman masyarakat terhadap informasi program dan partisipasi masyarakat yang belum merata.

#### 4. PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas transparansi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena melalui transparansi masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah secara terbuka. Dalam konteks Probebaya, transparansi sangat penting karena program ini melibatkan penggunaan anggaran publik yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan warga.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pelaksanaan Probabaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan (disclosure). Ketiga aspek tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah kelurahan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program.

#### **4.1 Aspek Informatif dalam Pelaksanaan Probabaya**

Aspek informatif berkaitan dengan bagaimana pemerintah kelurahan menyampaikan informasi mengenai program Probabaya kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kelurahan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti melalui rapat RT, musyawarah warga, pemasangan spanduk kegiatan, serta penyampaian informasi secara langsung oleh ketua RT dan aparat kelurahan.

Informasi yang disampaikan meliputi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, jumlah anggaran, sasaran kegiatan, hingga proses pelaksanaan pembangunan. Penyampaian informasi tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan program Probabaya dan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Informasi yang jelas dan mudah dipahami akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, keterbukaan informasi juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah. Dalam penelitian ini, pemerintah kelurahan telah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masih ditemukan sebagian warga yang belum mengetahui secara rinci mengenai penggunaan anggaran Probabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya merata kepada seluruh masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda-beda serta keterbatasan komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan warga.

Menurut Sedarmayanti (2017), transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam memperoleh dan memahami informasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan perlu

meningkatkan efektivitas penyampaian informasi agar seluruh masyarakat dapat memahami pelaksanaan Probebaya secara menyeluruh.

#### **4.2 Aspek Keterbukaan dalam Pelaksanaan Probebaya**

Keterbukaan merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan. Dalam penelitian ini, keterbukaan pemerintah kelurahan terlihat dari adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program Probebaya.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan kegiatan melalui musyawarah RT maupun forum kelurahan. Usulan tersebut kemudian dibahas bersama untuk menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka pelaksanaan Probebaya menjadi lebih partisipatif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah yang terbuka akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat masih belum maksimal. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif dalam mengikuti kegiatan musyawarah atau pengawasan program. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan lingkungan.

Selain itu, terdapat kendala komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat, terutama dalam penyampaian informasi teknis mengenai pelaksanaan program. Beberapa masyarakat mengaku hanya mengetahui hasil pembangunan tanpa memahami proses penganggaran maupun mekanisme pelaksanaannya.

Menurut Dwiyanto (2015), keterbukaan pemerintah harus diwujudkan melalui komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menerima masukan dan kritik dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah kelurahan telah berupaya menciptakan keterbukaan melalui forum musyawarah dan koordinasi dengan RT. Akan tetapi, diperlukan peningkatan sosialisasi dan komunikasi agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam setiap tahapan program Probebaya.

### 4.3 Aspek Pengungkapan (*Disclosure*) dalam Pelaksanaan Probebaya

Aspek pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kelurahan telah melakukan pelaporan kegiatan Probebaya melalui dokumentasi kegiatan, laporan administrasi, dan penyampaian hasil pembangunan kepada masyarakat.

Pengungkapan informasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik. Dalam pelaksanaan Probebaya, pemerintah kelurahan bersama ketua RT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan informasi terkait laporan keuangan dan rincian penggunaan anggaran masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa pembangunan telah dilaksanakan tanpa memahami rincian biaya dan mekanisme pelaporannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya berjalan optimal. Pemerintah kelurahan perlu meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan dengan menggunakan media informasi yang mudah dipahami masyarakat, seperti papan informasi, media sosial, maupun laporan sederhana yang dapat diakses publik.

Menurut Krina (2014), pengungkapan informasi publik harus dilakukan secara jelas, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat agar tercipta pengawasan publik yang efektif. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

### 4.4 Faktor Pendukung Transparansi Pelaksanaan Probebaya

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung transparansi pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Faktor pertama adalah adanya regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan Probebaya, seperti Peraturan Wali Kota Samarinda tentang pedoman teknis pelaksanaan program. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah kelurahan dalam melaksanakan program secara transparan dan akuntabel.

Faktor kedua adalah adanya koordinasi antara pemerintah kelurahan, ketua RT, dan masyarakat. Kerja sama yang baik antara berbagai pihak memudahkan proses penyampaian informasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Faktor ketiga adalah dukungan masyarakat terhadap program Probebaya. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan membantu menciptakan transparansi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan transparansi pemerintahan dipengaruhi oleh adanya partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan publik.

#### **4.5 Faktor Penghambat Transparansi Pelaksanaan Probebaya**

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat transparansi pelaksanaan Probebaya. Faktor pertama adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme program dan penggunaan anggaran. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Faktor kedua adalah keterbatasan penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai pelaksanaan Probebaya belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga, sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui perkembangan program.

Faktor ketiga adalah kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah dan evaluasi program. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif dan menyerahkan seluruh proses pelaksanaan kepada pemerintah kelurahan dan ketua RT.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan akses informasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transparansi pemerintahan daerah. Menurut Dwiyanto (2015), transparansi tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah kelurahan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai program Probebaya, memperluas akses informasi publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Bagian ini adalah bagian utama dari artikel dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel, di mana penulis harus menafsirkan temuan lewat diskusi antara hasil penelitian dengan teori atau hasil penelitian lain

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Probebaya telah menunjukkan upaya penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Transparansi tersebut terlihat melalui penyampaian informasi kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program. Aspek informatif diwujudkan melalui penyebaran informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran Probebaya kepada masyarakat. Selain itu, aspek keterbukaan tercermin dari adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah maupun proses pengawasan pelaksanaan program. Pada aspek pengungkapan (disclosure), pemerintah kelurahan telah berupaya memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana secara terbuka kepada masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan transparansi Probebaya masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, kurang optimalnya penyampaian informasi kepada seluruh warga, serta masih adanya masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan musyawarah maupun pengawasan program. Di sisi lain, faktor pendukung transparansi pelaksanaan Probebaya meliputi adanya regulasi pemerintah yang jelas, dukungan aparatur kelurahan, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan ketua RT dan lembaga masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pelaksanaan Probebaya memiliki peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media yang lebih efektif dan mudah diakses, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan agar penelitian mengenai Probebaya tidak hanya berfokus pada aspek transparansi, tetapi juga mengkaji efektivitas program, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) agar memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.

- Arenawati. (2014). *Administrasi pemerintah daerah: Sejarah konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Buluamang. (2017). Transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 49–57.
- Dewi, & Widarto. (2023). Literatur review transparansi dan akuntabilitas di Indonesia selama satu dekade. *Jurnal Administrasi Publik*, 6, 207–216.
- Gunawan, A. (2021). Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan program pemberdayaan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 135–145.
- Idrus, S. A. (2019). *Kualitas pelayanan dan keputusan pembelian konsep dan teori*. Media Nusa Creative.
- Kaelan. (2015). *Metode penelitian kualitatif interdisipliner*. Paradigma.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Gava Media.
- Lopez, F. J., Torres, A. A. J. B. P. M. P. R. (2017). Accessibility and transparency: Impact on social economy. *Online Information Review*, 41(1).
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., et al. (2015). *Akuntansi sektor publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. UNS Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2015). *Akuntansi pemerintahan di Indonesia* (Cetakan ke-4). YKPN.
- Ngusmanto. (2015). *Ekonomi pembangunan*. Deepublish.
- Pasolong, H. (2017). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Prastowo, A. (2016). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Riyadi, S., & Bratakusumah, D. S. (2018). *Manajemen pembangunan daerah*. PT Gramedia.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Pengantar ilmu administrasi publik*. Umsida Press.
- Silalahi, U. (2018). *Metode penelitian sosial*. PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sukardi. (2018). *Penelitian kualitatif-naturalistik dalam pendidikan*. Usaha Keluarga.
- Sunarno, H. S. (2024). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Triyono, R. (2015). *Metode penelitian kuantitatif*. Papas Sinar Sinanti.

Wardani, A. K. (2019). Urgensi inovasi pelayanan bidang administrasi publik di era disrupsi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(3).

Winarno. (2017). *Pengantar penelitian ilmiah dasar metode dan teknik*. Tarsito.

### **Dokumen**

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Probebaya.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Probebaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Sumber Internet**

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2023). Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kelurahan pada setiap kecamatan di Kota Samarinda. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTI4IzI=/-b-per-kelurahan-b-luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kelurahan-pada-setiap-kecamatan-di-kota-samarinda.html>